

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian menunjukkan koalisi Arab Saudi, yang dibentuk pada Maret 2015 melalui Operasi Decisive Storm, gagal mencapai tujuan utama yaitu mengembalikan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dan mengalahkan kelompok Houthi. Meskipun mengcahkan superioritas militer dengan delapan negara anggota inti seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Sudan, plus dukungan logistik dari AS, Inggris, serta Prancis, koalisi tidak berhasil merebut wilayah strategis seperti Sanaa secara permanen. Houthi justru bertahan, beradaptasi dengan taktik gerilya, dan meluncurkan serangan balik ke perbatasan Saudi, termasuk rudal balistik ke Riyadh dan serangan drone ke fasilitas Aramco pada 2019 yang melumpuhkan 5% produksi minyak global.

Analisis menggunakan tiga indikator teori collective security Morgenthau mengonfirmasi kegagalan struktural. Pertama, koordinasi militer lemah karena ketergantungan berlebih pada serangan udara (lebih dari 62.000 serangan hingga 2020) dan blokade laut, tanpa operasi darat efektif yang terpusat. Hal ini memicu pelanggaran HAM massal, seperti pemboman fasilitas sipil yang menewaskan ribuan warga (18.408 korban sipil tercatat), serta krisis kemanusiaan dengan 2 juta anak mengalami kekurangan gizi akibat hambatan bantuan. Kedua, komitmen deterensi agresi gagal karena fragmentasi keyakinan bersama. Krisis Teluk 2017 memaksa Qatar mundur dari koalisi atas tuduhan dukungan Ikhwanul Muslimin, sementara serangan Houthi naik 200% pasca-perjanjian Stockholm 2018, menandakan ketidakmampuan menciptakan pencegahan permanen terhadap ekspansi Houthi yang didukung Iran. Ketiga, kesatuan politik absen karena dominasi kepentingan nasional anggota. UAE prioritaskan ekspansi di Yaman selatan via proxy forces untuk kuasai Bab al-Mandab, Mesir fokus blokade laut demi bantuan ekonomi Saudi, Sudan tukar pasukan dengan dana rekonstruksi, sementara Kuwait dan Oman netral demi perdagangan dengan Iran. Perpecahan ini mengubah intervensi menjadi perang proksi berkepanjangan, memperburuk instabilitas regional dan krisis kemanusiaan dengan 17.500 korban jiwa hingga 2020 menurut OCHA. Secara keseluruhan, skripsi membuktikan bahwa pendekatan militer unilateral tanpa solidaritas kolektif justru eskalasi konflik internal

Yaman menjadi proksi Saudi-Iran, melanggar prinsip Morgenthau tentang superioritas militer gabungan, keyakinan deterensi, dan pengorbanan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Fenomena ini memperkaya literatur keamanan regional Timur Tengah, menyoroti keterbatasan intervensi eksternal dalam konflik multidimensional.

Adapun hal yang menjadi faktor kegagalan koalisi Arab Saudi, ditandai dengan Koordinasi militer terganggu oleh kurangnya komando terpusat, di mana Saudi dominan tapi anggota lain batasi kontribusi. Serangan udara intens (20.100 kali) gagal hancurkan suplai Houthi via laut, sementara Houthi beradaptasi dengan rudal Burkan-2 jangkauan 1.000 km yang mampu membalikan serangan ke pihak koalisi diperbatasan. Blokade pelabuhan picu kelaparan, bukan kekalahan musuh, melanggar prinsip distinction dan proportionality hukum humaniter internasional, serta komitmen deterensi retak oleh krisis internal koalisi diawali dengan Qatar mencabut diri pasca-blokade Saudi-UAE, mengurangi solidaritas anti Iran, sehingga Houthi dapat kembali menguasai wilayah strategis di Yaman serta menargetkan serangan ke Abqaiq-Khuras Aramco sehingga mengakibatkan kenaikan harga minyak global sebesar 20%. Kepentingan politik nasional pengaruhnya paling destruktif bagi koalisi, sebagaimana UAE terapkan "divide et impera" mendukung Giants Brigades anti-Islah untuk kuasai Aden dengan membangun pembangunan ekonomi sebesar 70% kontrak dari UAE sedangkan Mesir-Sudan bersifat kalkulatif lebih ke remitansi Arab Saudi sehingga menjadikan partisipasi terbatas dalam Gerakan intervensi, selain itu Netralitas Oman-Kuwait lindungi perdagangan Iran, hasilkan koalisi heterogen bukan kolektif. Akibatnya, Houthi legitimate domestik sebagai perlawanan okupasi